



Pedagang Kaki Lima Mulai Dikenai Retribusi Elektronik

“Pedagang kalau mau jualan terpaksa bayar ke mereka. Disuruh bayar Rp 5-10 juta.

Duit dari mana?”

JAKARTA — Pemerintah DKI mulai menerapkan retribusi elektronik untuk seluruh pedagang kaki lima kemarin. Para pedagang tak lagi membayar retribusi dengan uang tunai, melainkan langsung melalui sistem autodebit di Bank DKI. “Mungkin kami seperti kurang kerjaan kenapa memaksa seperti ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemarin.

Basuki beralasan, retribusi elektronik diterapkan untuk memberantas jual-beli kios yang dilakukan pejabat nakal di jajarannya. Menurut dia, kios dan lokasi binaan yang dibangun pemerintah kerap menjadi ladang uang bagi aparatnya yang tak bertanggung jawab.

“Semua tempat dagang kami dicuri oknum pejabat.” Padahal pemerintah membangun untuk menyewakan tempat itu untuk membantu dan menertibkan cara berdagang. “Pedagang yang mau jualan terpaksa bayar ke mereka. Disuruh bayar 5-10 juta. Duit dari mana?” ucap Ahok—sapaan Basuki.

Retribusi lewat jasa perbankan ini juga bertujuan menghilangkan praktek pungutan liar yang dilakukan para pegawai negeri. “Rp 140-160 ribu per hari pedagang bisa *nyetor* ke orang tidak jelas,” tuturnya.

Ahok juga mengatakan, penggunaan *e-retribusi* memudahkan pemerintah mendata pedagang serta bisa mengetahui transaksi penjualan tiap harinya. Jika transaksi penjualannya menguntungkan, ia tak segan-segan menambah modal untuk para pedagang. Namun dia juga mengancam, jika ada pedagang yang nakal dengan memalsukan kartu debit Bank DKI, pemerintah

akan menindak. “Jadi, Bapak-Ibu jangan sampai datang ke Pasar Senen untuk memalsukan kartu,” kata Ahok di depan pedagang kawasan sentra ikan hias Gunung Sahari.

Ahok akan menuntut pemalsu dengan delik pengaduan kejahatan perbankan dan ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara. Selama ini, hukuman untuk pedagang kaki lima liar hanya denda ringan dan, menurut Ahok, itu tak membuat mereka jera.

Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DKI Jakarta, Joko Kundryo, saat ini baru tercatat sekitar 20 ribu pedagang kaki lima di lima wilayah kota yang menggunakan retribusi via bank ini. Jumlah ini, kata Joko, jauh dari target 200 ribu pedagang.

Joko menjelaskan, bagi pedagang yang bisa melakukan *e-retribusi*, syaratnya cukup mudah. Pedagang harus memiliki surat izin usaha mikro dari Dinas, memiliki identitas diri, dan mau turut serta dalam program autodebit. Syarat lainnya yang diterapkan Bank DKI adalah pedagang harus membuka rekening tabungan. “Sangat gampang,” katanya.

Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto menjelaskan, setiap tanggal 15, bank langsung melakukan debit. Jika tidak ada uang dalam ATM tersebut, maka didebit lagi tanggal 20. Kalau tidak ada uang lagi, didebit ulang tanggal 25. Sampai akhir bulan tidak ada uang, maka pedagang tersebut dianggap menunggak.

Yayat Supriyatna, 44 tahun, pedagang di sentra ikan hias, menilai penerapan *e-retribusi* tidak memberatkan dirinya. “Tidak berat amat, sama saja,”

ujar pria asal Bogor itu. Sebab, selama satu bulan hanya membayar Rp 120 ribu untuk retribusi. Atau jika dihitung per hari, dirinya hanya bayar Rp 4.000.

● ERWAN HERMAWAN